

# **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI OBYEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**NANA DESY NATALIA**

**NIM 12020110120046**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Nana Desy Natalia

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110120046

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI OBYEK  
WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL**

Dosen Pembimbing : Dr.Nugroho SBM.MSP

Semarang, 30 Januari 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr.Nugroho SBM.MSP)

NIP.196105061987031002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : NANA DESY NATALIA

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110120046

Fakultas/Jurusan : EkonomikadanBisnis

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI  
OBYEK WISATA GUCI KABUPATEN  
TEGAL**

**Telahdinyatakanlulusujianpada tanggal 18 Februari 2015**

Tim Penguji

1. Dr. Nugroho SBM.MSP ( ..... )
2. Nenik Woyanti SE,M.Si ( ..... )
3. Arif Pujiyono SE,M.Si ( ..... )

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.  
NIP. 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nana Desy Natalia, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI OBYEK WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Februari 2015

Yang membuat pernyataan,

Nana Desy Natalia

NIM: 12020110120046

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi obyek wisata Guci kabupaten Tegal. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dan peningkatan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Tegal di masa mendatang dalam rangka pengambilan ke kebijakan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan obyek pariwisata Guci dalam kurun waktu 4 tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi-strategi pengembangannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat dua belas jenis strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan retribusi obyek pariwisata Guci di kabupaten Tegal.

Saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini untuk implikasi kebijakan adalah menerapkan strategi *hold and maintence* yang telah ditentukan sehingga kinerja retribusi akan maksimal, dan penerimaan asli daerah dapat meningkat. Saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya adalah agar meneliti mengkaji ulang pengaruh retribusi terhadap PAD pada obyek penelitian yang lain dengan rentang waktu yang banyak, sehingga dari penelitian tersebut dimungkinkan dapat memberi hasil temuan yang berbeda dari hasil penelitian ini sehingga penelitian lanjutan tersebut dapat melengkapi kelemahan dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** *retribusi, Guci, SWOT.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze revenue, Tegal regency wisata Guci object. This study is expected to be taken into consideration and improvement levy Tegal regency tourism sector in the future in order to government policy-making.*

*This study uses data from the financial statements of tourism Jar within 4 years from 2010 to 2014. This study used a SWOT analysis to determine their development strategies.*

*The results of this study indicate there are twelve types of strategies can be developed to increase revenue, tourism objects Jar in Tegal regency.*

*Suggestions can compilers provide in connection with the results of this research for policy implications are implementing strategies and maintence hold predetermined that would levy a maximum performance, and can increase local revenues. Suggestions for improvement of future research is to examine the influence of reviewing the levy to PAD in another study object with a span that much, so it is possible from these studies may give different results from this study that further research can complement the weaknesses in this study .*

**Keywords:** *retribution, Guci, SWOT.*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Ketika masalah datang, Tuhan Yesus tidak meminta kita memikirkan jalan keluar sehingga penat. Tuhan Yesus hanya meminta kita untuk SABAR dan BERDOA”**

**(Nana Desy Natalia, 2015)**

### **Persembahan:**

**“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, nasehat, ketulusan dan do’a yang tidak pernah putus”**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat, hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hadi Sasana, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Bapak Dr.Nugroho SBM.MSP, selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, solusi, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. BapakDrs. H. Edy Yusuf AG. M.sc. P.hd, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis selama penulis belajar di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
4. Para Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro.



5. Keluarga penulis, Mama, Papa, kakak, Nenek. Terimakasih atas perjuangan, kepercayaan, dukungan, materi, kasih sayang, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan Yesus membalas semua kebaikan kalian.
6. Kakak June Candra L.S, Liana Ragil Putri, Tante Magdalena, Tante Anita, Om Heru, Om Hari, Adik Dita, Yoga, Lingga. Terimakasih telah mendukung dalam hal materi dan motivasi kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.
7. Tri Johan Firdaus sebagai teman dekat yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Meliza Anindita sahabat terbaikku yang selalu menemani dalam suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sangat baik. semoga kita selalu bersama selamanya. Amin.
9. Teman-teman penulis, Abang Hans, Abang Rey, Gio, Afrian, cik Venita, Astri Winarti, Hani Agustina, Pipit Angrelia. Terimakasih kalian selalu menghibur penulis dan menjadikan hidup penulis lebih berwarna.
10. Teman-teman IESP 2010, Terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan penulis dan membuat suasana kuliah menjadi berwarna selama 4 tahun di bangku perkuliahan.
11. Terakhir untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi teman-teman dan pembaca lainnya.

Semarang, Februari 2015

Penulis

Nana Desy Natalia

## DAFTAR ISI

### Halaman

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii   |
| PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....  | iii  |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....  | iv   |
| ABSTRACT.....  | v    |
| ABSTRAK .....  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....   | vii  |
| DAFTAR TABEL.....  | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....   | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 9    |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 9    |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....  | 9    |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian .....  | 10   |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 10   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 12   |
| 2.1 Landasan Teori .....   | 12   |
| 2.1.1 Keuangan Negara.....   | 12   |
| 2.1.2 Keuangan Daerah.....   | 14   |
| 2.1.2.1 Sumber Pendapatan Daerah .....   | 17   |
| 2.1.3 Target Pendapatan Daerah.....  | 20   |
| 2.1.4 Kriteria Sumber Penerimaan Daerah .....                                    | 21   |
| 2.1.5 Retribusi Daerah .....   | 22   |
| 2.1.5.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah.....  | 26   |
| 2.1.5.2 Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah ..... | 27   |
| 2.1.5.3 Alasan Pengenaan Retribusi Daerah .....                                  | 30   |
| 2.1.6 Pariwisata.....  | 30   |
| 2.1.6.1 Jenis Pariwisata .....   | 32   |
| 2.1.6.2 Pengembangan Pariwisata.....   | 34   |
| 2.1.7 Retribusi Pariwisata .....   | 36   |
| 2.1.8 Potensi .....  | 37   |
| 2.1.9 Pengunjung .....   | 38   |
| 2.1.10 Tarif .....   | 39   |
| 2.1.11 Efektifitas retribusi .....   | 41   |
| 2.1.12 Cara Menentukan Strategi Untuk Penerimaan Retribusi Pariwisata .....      | 42   |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....   | 44   |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....   | 47   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....   | 48   |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....                   | 48   |
| 3.1.1 Variabel Penelitian.....   | 48   |

|  |    |
|--|----|
| 3.1.2 Definisi Operasional Variabel .....  | 48 |
| 3.2 Obyek Penelitian .....   | 49 |
| 3.3 Jenis Dan Sumber Data .....  | 50 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data .....  | 50 |
| 3.5Metode Analisis Data .....  | 51 |
| 3.5.1 Efektifitas Penerimaan Retribusi Tempat Pariwisata Guci Kabupaten<br>Tegal ..... | 52 |
| 3.5.2 Analisis SWOT .....  | 52 |
| 3.5.2.1 Penjelasan Matriks IFE dan EFE .....   | 53 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....  | 62 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....  | 62 |
| 4.1.1 Kota Tegal .....   | 63 |
| 4.1.2 Obyek Wisata Guci .....  | 63 |
| 4.2 Variabel Penelitian .....  | 64 |
| 4.2.1 Penerimaan PAD Daerah.....   | 65 |
| 4.2.2 Penerimaan Retribusi Pariwisata Guci Kabupaten Tegal.....                        | 65 |
| 4.2.3 Target Penerimaan Retribusi Pariwisata .....                                     | 66 |
| 4.3 Hasil Penelitian .....   | 67 |
| 4.3.1 Hasil Penelitian Kuantitatif .....   | 68 |
| 4.3.2 Hasil Penelitian Kualitatif .....  | 68 |
| 4.3.2.1 Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal .....                                   | 70 |
| 4.3.2.2 Matriks IE.....  | 73 |
| 4.3.3.3 Matrik SWOT.....   | 77 |
| 4.4 Pembahasan.....  | 79 |
| BAB V PENUTUP.....   | 82 |
| 5.1 Kesimpulan.....  | 82 |
| 5.2 Saran.....   | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....   | 87 |

## DAFTAR TABEL

### Halaman

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tegal Tahun 2012-2014 .....   | 5  |
| Tabel 1.2 Realisasi Retribusi Obyek Pariwisata Guci Kabupaten Tegal terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014..... | 7  |
| Tabel 2.1 Pola Hubungan antara Kemampuan Keuangan Daerah dengan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Pusat-Daerah.....                  | 17 |
| Tabel 2.2 Strategi Utama.....  | 44 |
| Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....   | 44 |
| Tabel 3.1 Analisis SWOT .....  | 59 |
| Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata Obyek Wisata Guci 2010-2014.....   | 65 |
| Tabel 4.3 Target Penerimaan Retribusi Pariwisata Obyek Wisata Guci 2010-2014 .....   | 67 |
| Tabel 4.4 Efektifitas Restribusi.....  | 68 |
| Tabel 4.5 Evaluasi Faktor Internal .....   | 71 |
| Tabel 4.6 Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Pariwisata .....   | 71 |
| Tabel 4.7 Evaluasi Faktor Eksternal Pariwisata.....  | 72 |
| Tabel 4.8 Identifikasi Peluang dan Ancaman .....   | 72 |
| Tabel 4.9 Hasil Analisis SWOT .....  | 77 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                    | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 47      |
| Gambar 3.1 Matriks IE.....         | 60      |
| Gambar 4.1 Matriks IE.....         | 73      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran A Daftar Pertanyaan Wawancara ..... | 87      |
| Lampiran B Foto-foto .....                   | 88      |
| Lampiran C Surat Ijin Penelitian .....       | 90      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pembangunan merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan nasional pembangunan Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat, yakni: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam proses pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari arahan, guna mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai hakekat dan arah dari pembangunan ekonomit ersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber, kelembangaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan dan



memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan dimensi yang lebih jelas bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan nasional yang bersifat inklusif mengedepankan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Dengan dimensi yang jelas tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dari APBN, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai dari APBD. Dengan demikian sistem pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu ,pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal,sehingga akan tersedianya keuangan

daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan optimalisasi penggalan dan ada dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan PAD merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan penerimaan pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 yaitu, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan

retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Upaya dalam peningkatan pendapatan oleh setiap pemerintah daerah pada level Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain. Kebijakan melakukan otonomi daerah untuk melakukan pembangunan daerahnya tersebut, memperoleh sumber pembiayaan dari APBN dan PAD. Sumber-sumber pendapatan APBN berasal dari Negara untuk daerah otonom, sedangkan PAD, diperoleh daerah dari adanya retribusi beberapa sektor yang berpotensi di daerah tersebut.

Obyek pariwisata guci adalah salah satu sumber retribusi yang dihasilkan dari sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tegal. Retribusi dari sector pariwisata Guci yang ada di Kabupaten Tegal sangat berpotensi sekali sebagai salah satu sumber yang memberikan sumbangan tertinggi di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, pariwisata Guci sebagai salah satu sumber retribusi daerah otonom harus dikelola dengan baik, agar dapat bermanfaat secara maksimal bagi daerah tersebut, sebab PAD daerah ini akan memberikan sumbangan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah .

Untuk mengetahui sumbangan yang harus diberikan Kabupaten Tegal untuk PAD Provinsi Jawa Tengah, yang terlihat dalam Tabel 1.1 Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tegal dari Tahun anggaran 2010-2014 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014**

| No        | Jenis Penerimaan | 2010           |      | 2011           |      | 2012           |      | 2013           |      | 2014           |      |
|-----------|------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
|           |                  | Realisasi      | %    | Realisasi      | %    | Realisasi      | %    | Realisasi      | %    | Realisasi      | %    |
| 1         | Pajak Daerah     | 2.847.339.000  | 14.2 | 8.007.274.000  | 23.6 | 7.696.439.000  | 22.0 | 9.959.588.000  | 22.7 | 10.021.667.000 | 22.4 |
| 2         | Retribusi Daerah | 8.225.800.000  | 41.1 | 15.958.778.000 | 47.0 | 16.750.177.000 | 48.0 | 19.901.736.000 | 45.4 | 20.617.332.000 | 45.7 |
| 3         | Bagian Laba BUMD | 3.490.741.000  | 23.4 | 1.644.081.000  | 4.85 | 1.520.632.000  | 4.35 | 2.177.084.000  | 4.97 | 2.347.284.000  | 5.01 |
| 4         | Penerimaan Lain  | 5.424.252.000  | 21.1 | 8.303.136.000  | 24.4 | 8.924.915.000  | 25.5 | 11.778.669.000 | 26.8 | 12.789.336.000 | 26.8 |
| Total PAD |                  | 19.988.132.000 | 100  | 33.913.269.000 | 100  | 34.892.163.000 | 100  | 43.817.077.000 | 100  | 45.775.619.000 | 100  |

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal, 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2010-2014, memperlihatkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar dan menempati urutan pertama terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Tegal. Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi penerimaan komponen PAD lain seperti pajak daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Sumbangan retribusi daerah pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 8.225.800.000,00 atau berkontribusi sebesar 41,15% terhadap PAD. Kemudian pada tahun 2011 sumbangan retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 15.948.778.000,00 atau berkontribusi sebesar 47,04% terhadap PAD. Begitu juga pada tahun 2012 retribusi daerah tetap mengalami peningkatan sebesar Rp 16.750.177.000,00 atau berkontribusi sebesar 48,01% terhadap PAD, dan pada tahun 2013 sumbangan retribusi daerah mengalami peningkatan yang relative tinggi sebesar Rp 19.901.736.000,00 akan tetapi kontribusinya mengalami penurunan sebesar 45,42% terhadap PAD ini disebabkan sumbangan penerimaan PAD yang lain juga mengalami peningkatan, serta dan pada tahun 2014 sumbangan retribusi daerah mengalami peningkatan yang relative tinggi sebesar Rp 20.617.332,00 dan kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 45,72% terhadap PAD.

Fenomena diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Tegal cenderung meningkat dari tahun ketahun. Permasalahan umum yang sering ditemukan dalam pengelolaan retribusi daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi rill obyek

retribusi yang dimilikinya. Seharusnya upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi didasarkan pada potensi yang realistis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi riil dari faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi tersebut, salah satunya retribusi pariwisata.

Berdasarkan pentingnya retribusi sektor pariwisata guci ini, akan disajikan data realisasi pencapaian retribusi obyek pariwisata Guci tahun 2010-2014 kabupaten Tegal.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Retribusi Obyek Pariwisata Guci Kabupaten Tegal terhadap**  
**Retribusi Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010-2014**

| Tahun | Realisasi        | Retribusi Daerah  | Kontribusi terhadap retribusi daerah(%) |
|-------|------------------|-------------------|---|
| 2010  | Rp 1.381.430.650 | Rp 8.225.800.000  | 16,79%                                  |
| 2011  | Rp 2.028.279.000 | Rp 15.950.877.800 | 12,71%                                  |
| 2012  | Rp 2.050.959.400 | Rp 16.750.017.700 | 12,44%                                  |
| 2013  | Rp 2.486.393.600 | Rp 19.900.173.600 | 12,49%                                  |
| 2014  | Rp 1.898.086.500 | Rp 20.061.733.200 | 9,26%                                   |

Sumber: Dinas Pariwisata Tegal, 2014

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2010 kontribusi obyek wisata guci terhadap retribusi daerah sebesar 16,79%. pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 12,71% dan dari tahun ke tahun semakin menurun. pada tahun 2014 kontribusinya menurun menjadi 9,26%

Kontribusi obyek wisata guci terhadap retribusi daerah diharapkan mengalami kenaikan yang terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kabupaten Tegal sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan

berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah.

Peningkatan penerimaan retribusi pariwisata harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan system yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pariwisata semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi retribusi pariwisata agar mampu melampaui target retribusinya.

Kawasan Taman Wisata Pemandian Air Panas (TWPAP) Guci adalah salah satu sektor wisata yang merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi daerah. Apabila TWPAP Guci ini dikembangkan dengan baik, maka pariwisata ini akan mempunyai daya tarik wisata yang lebih besar dibanding beberapa obyek wisata lain. Disamping itu kawasan Taman Wisata Pemandian Air Panas Guci juga mempunyai fungsi utama sebagai salah satu hulu Daerah Aliran Sungai Gung yang merupakan penyedia air irigasi untuk sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Tegal. Obyek wisata ini mempunyai daya tarik gabungan antara wisata darat dimana didominasi oleh hutan, wisata air panas dan air dingin.

Keunikan dan daya Tarik wisata inilah, pengunjung yang akan memasuki TWPAP Guci ini dikenai tarif masuk. Penetapan tariff mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tariff retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan

semakin meningkat (Arizaldy2009), sehingga penetapan tarif diduga mempunyai pengaruh yang positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pariwisata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Besarnya pengelolaan anggaran daerah Kabupaten/Kota harus berorientasi pada pencapaian target. Dari adanya pencapaian target tersebut dapat diukur adanya tingkat efektifitas penerimaan daerah atau retribusi.

Adanya perbedaan target dengan realisasi penerimaan retribusi dari tahun ketahun seperti yang terjadi pada tahun 2010-2014, dimana realisasi penerimaan retribusi pariwisata tidak mencapai target. Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis ingin menganalisis penerimaan retribusi Obyek wisata Guci Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas realisasi penerimaan retribusi pariwisata G u c i di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana suatu strategi yang tepat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata Guci di Kabupaten Tegal?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka, tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Efektivitas realisasi penerimaan retribusi pariwisata Guci di Kabupaten Tegal.



2. Menganalisis Strategi yang tepat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata Guci di Kabupaten Tegal.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada :

1. Pengambil kebijakan

Bagi para pengambil kebijakan terutama pemerintah daerah kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna di dalam pengambilan kebijakan mengenai retribusi daerah sehingga dapat berjalan efektif untuk ke depannya.

2. Ilmu pengetahuan

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi makro dan perencanaan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai dampak retribusi daerah terhadap perekonomian Negara.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur, yang sesuai dengan topik dari skripsi yang dapat membantu penulisan. Pada bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran atas permasalahan yang diteliti serta hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dimulai dari definisi operasional dan variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data sampai dengan teknik analisis data dan analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil, analisis serta pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat dalam skripsi ini.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan saran-saran yang mendukung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Keuangan Negara**

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan.
2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada

kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

3. Dari sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD.
4. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan pada penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan kedua pengertian keuangan negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

### **2.1.2 Keuangan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167).

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan

#### 4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169). Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**  
**Pola Hubungan antara Kemampuan Keuangan Daerah dengan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Pusat-Daerah**

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola hubungan |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Rendah sekali      | 0%-25%          | Instruktif    |
| Rendah             | 25%-50%         | Konsultatif   |
| Sedang             | 50%-75%         | Partisipatif  |
| Tinggi             | 75%-100%        | Delegatif     |

Sumber : Abdul Halim (2002:169)

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), dimana persentase peranan pemerintah adalah sebesar  $> 75\%$ , atau kemandirian pemerintah daerah sebesar  $< 25\%$ .
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi, dimana persentase kemandirian pemerintah daerah adalah sebesar  $25\% - 50\%$ .

3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, dimana persentase kemandirian pemerintah daerah adalah sebesar 50% - 75%.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, dimana persentase kemandirian pemerintah daerah adalah sebesar  $> 75\%$ .

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.

#### **2.1.2.1 Sumber Pendapatan Daerah**

Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.



Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan,

Dana perimbangan yakni dana yang berasal dari pusat yang bertujuan menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi umum dialokasi dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Disamping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan Dana Darurat. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu

untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional (dari perpu 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah).

c. Pinjaman daerah,

Pinjaman daerah adalah transaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga pemerintah daerah tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (PP No.54 tahun 2005). Menurut pasal 169-171 UU No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah adalah dengan melakukan pinjaman dari dalam atau luar negeri dengan persetujuan DPRD.

Hal tersebut sejalan dengan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pembiayaan daerah melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan baru, misalnya pinjaman kepada pihak dalam negeri, luar negeri, pihak swasta maupun kepada masyarakat melalui obligasi.

d. Lain-lain penerimaan yang sah

Penerimaan lain yang sah terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga Internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan. dana darurat adalah

danayang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang terkena bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

### **2.1.3 Target Pendapatan Daerah**

Target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan, di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut (Soelarso, 1998):

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35 persen dari tunggakan sampai dengan tahun lalu.
3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80 persen dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan / penyesuaian, keanekaragaman tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku Wajib Pajak/bayar.
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.
7. Perkembangan tersedianya prasarana dan sarana serta biaya pungutan.

Adapun prosedur dalam penyusunan target pendapatan daerah beradadalam waktu satu bulan sebelum RAPBD disusun, maka setiap dinas/instansipenghasilan PAD harus sudah menyiapkan Rencana Target Penerimaan PAD kepada Dipenda, dengan tembusan kepada: (a) Biro Keuangan, (b) Bappeda, (c) Inspektorat Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota.

#### **2.1.4 Kriteria Sumber Penerimaan Daerah**

Kriteria yang harus dipenuhi dari suatu penerimaan daerah adalah:

##### **1. Kecukupan dan Elastisitas**

Sumber pendapatan daerah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang dikeluarkan. Jika suatu sumber penerimaan seperti retribusi hanya menghasilkan persentase yang kecil diatas anggaran yang dikeluarkannya, akan banyak menimbulkan kerugian yaitu ongkos pungutan yang menjadi besar, upaya administrasi terbagi-bagi, pembebanan sulit dicapai secara adil dan kesan yang negatif terhadap kemampuan keuangan akan timbul.

##### **2. Pemerataan**

Suatu sumber penerimaan seharusnya ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan konsep keadilan.

### 3. Kelayakan Administrasi

Suatu sumber penerimaan haruslah didukung dengan administrasi yang memadai yang akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam melakukan perhitungan, pengawasan dan pelayanan pungutan.(Davey, 2005)

#### 2.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Retribusi bersifat sukarela. Setiap orang memiliki pilihan untuk tidak membayar retribusi. Jika seseorang sudah membayar retribusi maka Pemerintah Daerah harus membarikan semacam kontraprestasi langsung, misalnya : seseorang telah membayar biaya retribusi izin usaha penyediaan jasa makanan dan minuman, maka Pemerintah Daerah harus menerbitkan izin tersebut jika seseorang tersebut telah memenuhi syarat yang diminta Peraturan Daerah yang bersangkutan. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

### 1. Retribusi Jasa Umum

- a. Objek retribusi jasa umum yakni pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pariwisata, pengujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan.
- c. Subjek retribusi jasa umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

### 2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Objek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil.
- b. Jenis-jenis usaha yakni pemakaian kekayaan daerah, pariwisata grosir, pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, penyedotan kaskus, rumah pemotongan hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyebrangan di atas air, pengolahan limbah cair, dan penjualan produksi usaha daerah.
- c. Subjek retribusi jasa usaha yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha bersangkutan.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek.
- c. Subjek perizinan tertentu yakni pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu di Pemerintah Daerah.

Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria :

#### 1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi jasa usaha.
- b. Jasa merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi sebagai penyediaan jasa pelayanan yang lebih baik.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan penuh oleh Pemerintah Daerah.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

### 2.1.5.1 Ciri-ciri retribusi daerah



Ciri-ciri yang terdapat dalam retribusi daerah (Musgrave, 1990) adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dikenakan pada siapa saja menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
2. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayaran retribusi.
3. Bagi yang telah menikmati jasa/tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa
4. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Josef Riwu Kaho (1998) adapun ciri-ciri mendasar dari retribusi yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh Negara
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Ada kontaprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Bagus Santoso (1995) menambahkan bahwa retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari segi : (1) kecukupan dan elastisitas, (2) keadilan dan (3) administrasi. Dari segi kecukupan dan elastisitasnya, maka retribusi pada dasarnya memiliki sifat yang kurang responsif terhadap perubahan ekonomi secara makro. Hal ini disebabkan karena hampir semua penerapan retribusi hanya didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang besarnya

relatif tetap. Dari segi keadilan penetapan retribusi biasanya cenderung bersifat regresif, tidak membedakan pengenaan tarif pada orang kaya dan miskin dimana dipukul samarata. Misalnya pengenaan retribusi air minum, telepon dan sebagainya. Dari segi administrasi, salah satu kelemahan retribusi adalah sulit menentukan target yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi sangat tergantung pada jumlah jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka karakteristik retribusi adalah : (1) retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku umum, (2) dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam bentuk pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Dimana pembayaran retribusi justru menghendaki adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah; contohnya pembayaran air minum, telepon, listrik, pariwisata dan sebagainya, (3) hasil penerimaan retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan, (4) pelaksanaan retribusi mudah diterapkan dalam hal pengenaan tarif dan pemungutan serta bersifat memaksa.

#### **2.1.5.2 Faktor-faktor penentu tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah**

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (dalam Caroline, 2005) adalah sebagai berikut :

- a) Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

b) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

c) Faktor tarif retribusi daerah

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

Pungutan retribusi langsung atas konsumen dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, Davey (dalam Caroline, 2005):

- a) Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa / barang tersebut.
- b) Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
- c) Mungkin ada bermacam-macam variasi didalam konsumsi individu, yang berkaitan sedikit-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan.
- d) Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu dalam negeri.
- e) Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan.

#### **2.1.5.3 Alasan pengenaan retribusi daerah**

Pungutan retribusi langsung atas konsumen dikenakan Karen satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, Davey (dalam Caroline, 2005):

1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh

karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa / barang tersebut.

2. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
3. Mungkin ada bermacam-macam variasi didalam konsumsi individu, yang berkaitan sedikit-tidaknya untuk memilih daripada memerlukan.
4. Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu dalam negeri.
5. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan.

#### **2.1.6 Pariwisata**

Menurut Suwanto (1997) Pariwisata adalah Perubahan tempat tinggal seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global.

Menurut Buchli (dalam Yoeti, 1985) yang dimaksud pariwisata adalah setiap peralihan tempat untuk sementara waktu dan mereka yang mengadakan perjalanan tersebut memperoleh pelayanan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, maupun untuk tujuan lainnya (Spillane, 1987).

Menurut UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah sebagai berikut :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait pada bidang tersebut.
4. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
5. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa.

Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan yaitu (Spillane, 1987):

1. Harus bersifat sementara

2. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

#### **2.1.6.1 Jenis Pariwisata**

Spillane (1987) menyatakan bahwa motif-motif dalam pariwisata sangat bervariasi dan mempunyai pengaruh yang menentukan pada daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi. Perbedaan motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata. Walaupun banyak jenis wisata ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, namun dapat pula dibedakan adanya beberapa jenis pariwisata khusus, yaitu :

##### **1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure tourism*)**

Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tujuan untuk berlibur, memenuhi keingin-tahuannya, mengendorkan syaraf-syaraf yang tegang, maupun untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan di kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan.

##### **2. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation tourism*)**

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk tujuan beristirahat, memulihkan kondisi jasmani

dan rohaninya, maupun untuk menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya mereka akan tinggal selama mungkin di tempat-tempat wisata agar menemukan kenikmatan yang diperlukan.

3. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural tourism*).

Jenis pariwisata ini ditandai dengan motivasi, seperti ingin belajar di pusat penelitian dan riset, untuk mempelajari adat istiadat dan kelembagaan dari daerah yang berbeda, untuk mengunjungi monumen bersejarah, untuk mengunjungi pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, maupun ikut serta dalam festival-festival seni musik.

4. Pariwisata untuk olahraga (*Sport tourism*)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk olahraga. Jenis pariwisata ini dapat dibagi dalam dua kategori :

- a. *Big Sport Events*, yaitu pariwisata-pariwisata olahraga besar yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya.
- b. *Sporting Tourism of the Practitioners*, yaitu peristiwa olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri. Negara yang memiliki banyak fasilitas atau tempat-tempat olahraga seperti ini tentu dapat menarik sejumlah besar penggemar jenis olahraga pariwisata ini.

5. Pariwisata untuk urusan dagang (*Bussines tourism*)

Pariwisata jenis ini menekankan pada pemanfaatan waktu luang oleh pelakunya disela-sela kesibukan bisnis yang sedang dijalani. Biasanya



waktu luang tersebut akan dimanfaatkan untuk mengunjungi berbagai obyek wisata yang ada di daerah tujuan.

#### 6. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention tourism*)

Motif pariwisata jenis ini biasanya dilatar belakangi oleh adanya agenda rapat atau konferensi yang biasanya dihadiri oleh banyak orang dari berbagai daerah atau negara yang berbeda, sehingga mengharuskan untuk tinggal beberapa hari di daerah atau negara penyelenggara konferensi tersebut.

#### **2.1.6.2 Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata tidak lepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan pengembangan disektor lainnya, maka didalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu proses yang terjadi secara terus menerus, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap ancaman yang ada untuk dapat berkembang dalam mencapai tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan (Demartoto, 2008).

Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Yoeti (2008) mengungkapkan beberapa prinsip perencanaan pariwisata, diantaranya:

- a. Perencanaan harus memiliki satu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian suatu negara.

- b. Perencanaan pengembangan kepariwisataan menghendaki pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya, terutama sektor pertanian, jasa, perdagangan, dan sektor transportasi.
- c. Perencanaan suatu daerah tujuan pariwisata harus berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk daerah tersebut dan dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam serta budaya di daerah yang bersangkutan.
- d. Perencanaan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah harus diikuti oleh adanya perencanaan fisik daerah yang bersangkutan secara keseluruhan.
- e. Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata tidak hanya memperhatikan segi administrasi saja tetapi juga didasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar, faktor geografis dan ekologi dari daerah yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengembangan kepariwisataan, perlu dilakukan pendekatan terhadap organisasi pariwisata yang ada (baik pemerintah, masyarakat, dan swasta) serta pihak-pihak terkait guna mendukung kelangsungan pembangunan pariwisata di daerah tersebut (Demartoto, 2008). Oleh karena itu, dalam perencanaan kepariwisataan dibutuhkan perumusan yang cermat dan diambil kata sepakat, apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan mana yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, sehingga dalam pengembangan selanjutnya tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan perbedaan anatara satu pihak dengan pihak yang lain.

### **2.1.7 Retribusi Pariwisata**

Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari retribusi pengunjung, retribusi izin penempatan lokasi dagang dan retribusi tempat parkir.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pariwisata adalah pungutan yang dikenakan pada pengunjung dan pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kunjungan tempat pariwisata atau pemakaian tempat-tempat pariwisata yang digunakan oleh pengunjung dan pedagang yang ada didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pariwisata masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan antara lain: (1) wajib retribusi adalah pengunjung yang mendatangi lokasi pariwisata, (2) obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat pariwisata, sedangkan subyek retribusi adalah pengunjung yang mendatangi tempat pariwisata, (3) penerimaan dari retribusi pariwisata masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pariwisata sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif

retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,(4) retribusi pariwisata yang dikenakan setiap pengunjung sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan, (5) untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi, (6) perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta di terapkan sistem denda.

#### **2.1.8 Potensi**

Menurut Sunarto (2005) potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur pendekatan yaitu : (1) berdasarkan fungsi penerimaan, (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (*tax base*).

Untuk menghitung potensi retribusi pariwisata perlu mengetahui komponen yang membentuk potensi daripada pariwisata itu sendiri. Komponen potensi pariwisata yaitu usia pengunjung, jenis kendaraan yang diparkir, tarif yang dipungut, dan periode pemungutan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam menggali potensi pariwisata adalah kurang optimalnya penanganan di dalam pengolahan data guna mendapatkan potensi yang optimal. Di dalam perhitungan akurasi nilai potensi yang sesuai dengan kondisi lapangan sangat terkait dengan kelengkapan atau terjadinya variabel-variabel untuk menghitung potensi retribusi yang optimal. Untuk mendapatkan potensi yang maksimal dan realistis perlu diadakan pendataan, pemantauan lapangan, dan pengkajian yang cermat.

#### **2.1.9 Pengunjung**

Menurut Sunarto (2005) pengunjung adalah mereka yang mengunjungi lokasi pariwisata. Jenis pengunjung di tempat pariwisata pada umumnya terdiri dari dua golongan yaitu orangtua dan anak-anak. Pemakaian tempat parkir yang digunakan oleh pengunjung juga dibedakan menjadi dua, yaitu jenis kendaraan yang diparkir roda dua atau roda empat.

#### **2.1.10 Tarif**

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya :

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.
2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.
3. Retribusi pariwisata antara kios dan los.

#### 4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Sedangkan tarif pariwisata merupakan besarnya biaya retribusi pariwisata yang dipungut oleh pemerintah Daerah atas penggunaan jasa/fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam satuan rupiah (Gesit Purnamasari, 2006).

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk meninjau kembalitarif secara berkala dan berkala dan jangka waktunya, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari obyek retribusi yang bersangkutan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan mereka.
3. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara berorientasi pada harga pariwisata.

4. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa, sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

#### **2.1.11 Efektifitas Retribusi**

Menurut Devas CN (1989) terdapat tiga tolak ukur dari penerimaan anggaran yang berkaitan dengan pajak/retribusi yaitu terdiri dari hal-hal seperti: upaya pajak/retribusi (*tax/charge effort*), hasil guna (*effectiveness*), daya guna (*efficiency*). Berikut merupakan penjelasan dari tolak ukur tersebut:

##### **1. Upaya pajak/retribusi (*tax/charge effort*)**

Upaya pajak/retribusi adalah hasil dari suatu sistem pajak/retribusi, teori ini dikemukakan oleh Nick Devas yang berbeda dengan teori *tax effort* dalam ilmu perpajakan, dimana dalam teori ini berkaitan dengan peraturan maupun undang-undang yang mengatur pajak/retribusi dan juga organisasi yang melaksanakan kegiatan pajak/retribusi tersebut. Sehingga upaya pajak/retribusi lebih banyak mengangkat sistem pajak/retribusi

secara keseluruhan yang lebih luas daripada menyangkut administrasi penerimaan pajak/retribusi.

## 2. Hasil guna (*effectiveness*)

Hasil guna menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan pajak/retribusi yaitu menentukan wajib pajak/retribusi, menetapkan nilai kena pajak/retribusi, menetapkan tarif pajak/retribusi, memungut pajak, menegakan sistem pajak/retribusi, dan membukukan penerimaan pajak/retribusi. Ada beberapa faktor yang mengancam hasil guna, antara lain menghindari pajak/retribusi kolusi antara petugas pajak/retribusi dan wajib pajak/retribusi, untuk mengurangi pajak/retribusi terhutang dan penipuan oleh petugas pajak/retribusi.

Efektifitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas pemungutan pajak/retribusi dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi pengelola retribusi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam studi ini, sasaran akhir utama retribusi tersebut adalah penerimaan retribusi yang direncanakan. Akan tetapi, untuk dapat memungut retribusi tersebut dibutuhkan berbagai kegiatan/usaha. Untuk dapat mengadakan studi dan analisis yang mendetail tentang efektifitas tersebut, model yang digunakan harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan-satuan kegiatan/subunit organisasi tersebut. Secara makro, efektifitas pemungutan retribusi dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan



sasaran penerimaan yang direncanakan/target. Secara sederhana efektifitas pemungutan retribusi yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Restribusi}}{\text{Target penerimaan retribusi}} \times 100\%$$

Semakin besar efektifitas menunjukkan semakin efektif pemungutan retribusi dihubungkan dengan sasaran yang akan diperoleh (Slamet Sularno 2000).

## **2.1.12 Cara Menentukan Strategi Untuk Penerimaan Retribusi Pariwisata**

### **a. Pengertian Strategi**

Menurut Husein Umar (2001) mendefinisikan strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

### **b. Klasifikasi Strategi**

Menurut Husein Umar (2001) strategi generik akan dijabarkan menjadi strategi utama/induk.

#### **1. Strategi Generik**

Menurut Fred R. David (2002) pada prinsipnya strategi generik dapat dikelompokkan atas empat kelompok strategi, yaitu:

##### **a. Strategi Integrasi Vertikal (*Vertical Integration Strategy*)**

Strategi ini menghendaki agar melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok atau pesaing.

##### **b. Strategi Intensif (*Insentif Strategy*)**

Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang insentif untuk meningkatkan posisi persaingan yang ada.

c. Strategi Diversifikasi (*Diversification Strategy*)

Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru.

d. Strategi Bertahan (*Difensive Strategy*)

Strategi ini bermaksud untuk melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang besar (kebangkrutan).

## 2. Strategi Utama Fred R. David

Jabaran strategi utama dari strategi generik Fred R. David dapat dijelaskan dalam Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Strategi Utama**

| Strategi Generik  | Strategi Utama  |
|---|---|
| Strategi Integrasi Vertikal<br>( <i>Vertical Integration Strategy</i> ) | Strategi Integrasi ke Depan( <i>Forward Integration Strategy</i> )<br>Strategi Integrasi ke Belakang( <i>Backward Integration Strategy</i> )<br>Strategi Integrasi Horizontal( <i>Horizontal Integration Strategy</i> )               |
| Strategi Intensif<br>( <i>Intensive Strategy</i> )                      | Strategi Pengembangan Pariwisata( <i>Market Development Strategy</i> )<br>Strategi Pengembangan Produk( <i>Product Development Strategy</i> )<br>Strategi Penetrasi Pariwisata( <i>Market Penetration Strategy</i> )                  |
| Strategi Diversifikasi<br>( <i>Diversification Strategy</i> )           | Strategi Diversifikasi Konsentrik( <i>Concentric Divers. Strategy</i> )<br>Strategi Diversifikasi Konglomerat( <i>Conglomerate Divers. Strategy</i> )<br>Strategi Diversifikasi Horisontal( <i>Horizontal Divers. Strategy</i> )      |
| Strategi Bertahan<br>( <i>Diversive Strategy</i> )                      | Strategi Usaha Patungan ( <i>Joint Venture Strategy</i> )<br>Strategi Penciutan Biaya( <i>Retrenchment Strategy</i> )<br>Strategi Penciutan Usaha( <i>Divesciture Strategy</i> )<br>Strategi Likuidasi( <i>Likuidation Strategy</i> ) |

Sumber: Husain Umar, 2001

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2.3**

### Penelitian Terdahulu

| No | Judul dan Penulis   | Tujuan Penelitian   | Variabel dan Metode Analisis Data  | Hasil Penelitian  |
|----|---|---|--|---|
| 1. | <i>Analisis efektivitas dan efisiensiPenerimaan retribusi daerah kabupaten Pesisir Selatan, Yeni del Rosa, 2012</i> | Menganalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Pesisir Selatan. | Variabel:<br>1. Realisasi penerimaan retribusi<br>2. Target penerimaan retribusi<br>Metode:<br>Analisis pengukuran penerimaan administrasi pajak & retribusi | Secara total tingkat efektivitas retribusi daerah dalam bentuk retribusi pariwisata setiap tahunnya relative mengalami kenaikan dengan tingkat efektivitas rata – rata sebesar 87,72%,begitu juga tingkat efesiesi rata – rata sebesar 74,09. |

| 2. | <i>Strategi pengembangan situs pariwisata Pantai Natsepa desa Suli Kab. Maluku Tengah, Wilda R. Payopo dan Jani Effendi, 2008</i> | Merumuskan strategi pengembangan situs pariwisata pantai Natsepa, Maluku Tengah.   | Variabel :<br>1. Pendapatan<br>2. Travel cost<br>3. Waktu berkunjung<br>4. Pekerjaan<br>5. Pendidikan<br>6. Umur<br>7. Daya Tarik Wisata<br>Metode :<br>1. Analisis Regresi Berganda<br>2. Analisis SWOT | <p>Dari tujuh faktor yang diduga berpengaruh ternyata faktor pendapatan, biaya perjalanan (<i>travel cost</i>), waktu berkunjung, umur dan daya tarik wisata berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi kunjungan ke kawasan wisata Pantai Natsepa, karena diperoleh nilai uji t hitung lebih besar dari t hitung pada tingkat kepercayaan 95%, sedangkan faktor pekerjaan dan pendidikan tingkat terlalu berpengaruh karena keputusan untuk berkunjung ke objek wisata ini lebih kepada jarak tempuh yang cukup dekat dengan biaya perjalanan yang relative murah.</p> <p>Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Natsepa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan objek wisata sesuai dengan kebijakan pemerintah dan konsep rencana induk kepariwisataan</li> <li>2. Peningkat kualitas objek wisata</li> <li>3. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana wisata dan sarana penunjang wisata</li> </ol> |
|----|---|--|--|---|
| No | Judul dan Penulis   | Tujuan Penelitian  | Variabel dan Metode Analisis Data  | Hasil Penelitian  |
| 3. | <i>Analisis permintaan dan strategi pengembangan Wisata bahari Kalianda Resort, M. Prihatna Sobari, dkk Tahun 2007</i>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi karakteristik pengunjung obyek wisata pantai kalianda resort</li> <li>2. Menduga kurva permintaan masyarakat terhadap rekreasi</li> </ol> | Variabel:<br>1. tingkat kunjungan<br>2. waktu berkala<br>3. biaya perjalanan<br>Metode :<br>Analisis SWOT  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presepsi dan preferensi pengunjung menyatakan bahwa pantai kalianda resort sangat nyaman dan sangat indah, hal ini dilihat dari tingkat pengunjung lebih dari 80%</li> <li>2. Hasil pendugaan tingkat kunjungan wisatawan tahun 2004 ke pantai kalianda resort adalah 65.780 orang dan elastisitas permintaan rekreasi yang didapat dari persamaan permintaan</li> </ol>  |

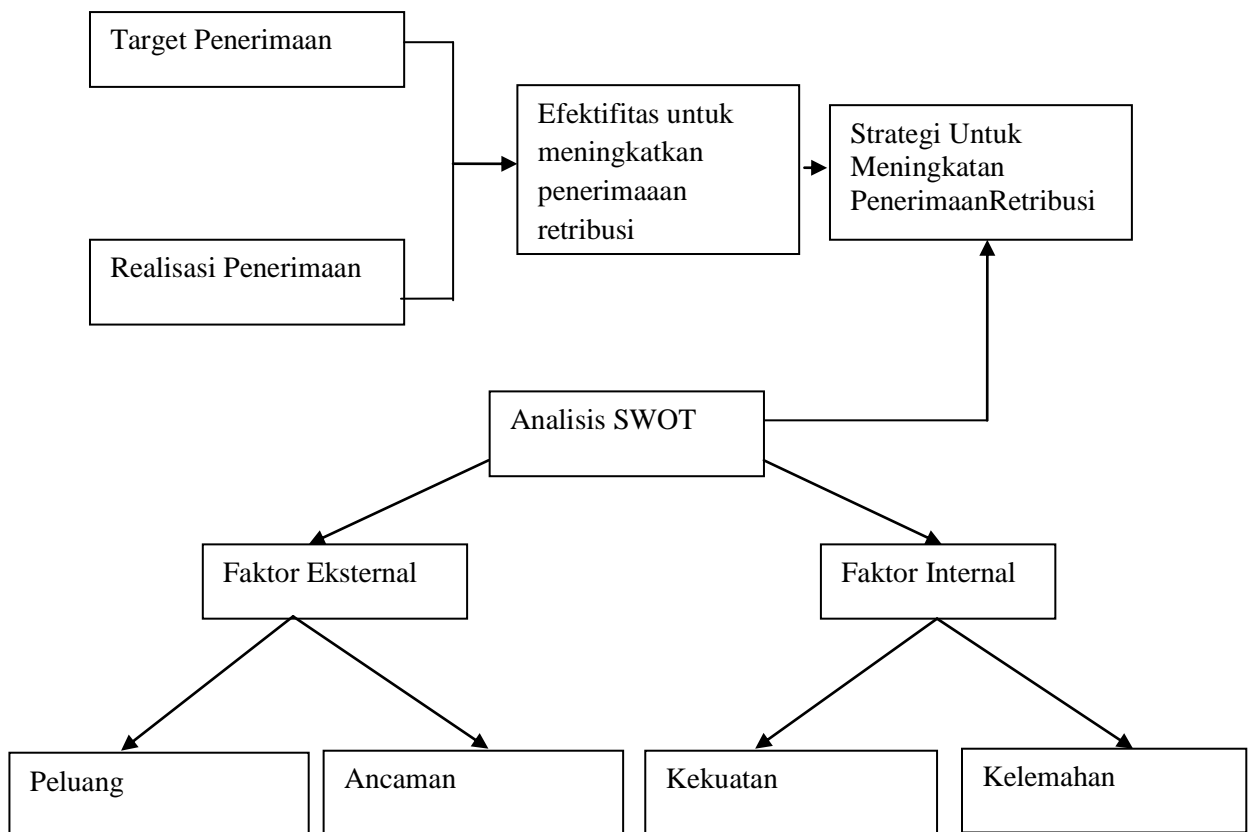
|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>wisata bahari di kalianda resort</p> <p>3. Merumuskan alternatif strategi pengembangan wisata bahari kalianda resort</p> |  | <p>rekreasi sebesar 2,4759 dari hasil perhitungan uji f</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis SWOT menghasilkan tiga strategi alternatif yang menjadi prioritas utama, menambah fasilitas sarana dan prasarana penunjang, serta gencar melakukan promosi yang bekerjasama dengan pemerintah.</li> <li>2. Mengantisipasi persaingan antara obyek wisata dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.</li> <li>3. Memperbaiki citra obyek wisata untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di saat situasi di Indonesia mulai stabil.</li> </ol> |
|--|--|---|--|--|

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2014

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai atau suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut.

##### **3.1.2 Definisi Operasional**

Definisi Operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Pada penelitian ini definisi operasionalnya adalah :

- a. Realisasi Penerimaan Retribusi adalah total tarif masuk dikali dengan harga tiket dan dikali dengan total jumlah pengunjung per tahun.
- b. Target Penerimaan Retribusi adalah jumlah target penerimaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap tempat pariwisata Guci yang harus diperoleh tiap tahunnya.
- c. Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk menentukan strategi pengembangan dari tempat pariwisata Guci.
- d. Kekuatan adalah sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul

dibandingkan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya,(Robinson,2008).

- e. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan panggan secara efektif, (Robinson,2008).
- f. Peluang adalah situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan.
- g. Ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam suatu lingkungan, (Robinson,2008).

### **3.2 Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini yaitu mengenai tarif retribusi obyek wisata Guci yang ditetapkan oleh pemerintah Tegal. Sedangkan unit analisis adalah Badan Layanan Umum Daerah Obyek wisata Guci yang merupakan unit operasional menjalankan kegiatan retribusi obyek wisata Guci, dan badan pengelola keuangan daerah Tegal yang mengelola keuangan terkait dengan retribusi tersebut.

### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

Berdasarkan tujuan, penelitian mengenai efektifitas tarif retribusi obyek wisata Guci termasuk dalam jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber aslinya. Data primer merupakan data yang digunakan untuk menyusun analisis SWOT diambil melalui hasil wawancara dengan anggota dinas pariwisata Tegal dan petugas pengelola tempat pariwisata Guci di Kabupaten Tegal. Selain itu, untuk mengetahui efektifitasnya, diperoleh dari akademisi yang berasal dari pengolahan/analisis laporan keuangan target dan realisasi Obyek Wisata Guci.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indrianto dan Supomo, 1999). Data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari berbagai penerbitan pemerintah pusat dan daerah seperti BPS Kabupaten Tegal, Bappeda Kabupaten Tegal, Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal dan data lainnya yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapat bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini adalah secara kuantitatif dan kualitatif melalui:

### 1. Wawancara

Dalam studi lapangan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan wawancara terhadap pengelola Obyek Wisata Guci untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan sumber penilaian dalam rangka menganalisis efektivitas retribusi Obyek Wisata Guci dan menganalisis strategi yang tepat untuk Obyek Wisata Guci yang akan datang.

### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa dokumen maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, majalah, yang sifatnya dokumentasi. Data sekunder ini didapatkan melalui studi kepustakaan. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari bahan-bahan yang berasal dari dokumen-dokumen Pemda Kabupaten Tegal, buku, skripsi, tesis, situs-situs internet, dan data-data penunjang lainnya.

## 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah data primer terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara deskriptif adalah teknik analisa yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian (Nazir, 1999).

### 3.5.1 Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Pariwisata Guci Kabupaten Tegal

Efektivitas retribusi mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi dan potensi hasil retribusi, dengan anggapan semua wajib retribusi membayar retribusi masing-masing, dan membayar seluruh retribusi terhitung masing-masing. Efektivitas yang tinggi akan tampak juga hasil penerimaan retribusi daerah diatas 80% , Slamet Sularno (2000). Semakin besar nilai efektivitasnya menggambarkan baiknya administrasi dan sistem pungutan retribusi.

Adapun rumus untuk menghitung efektivitas penerimaan retribusi menurut Slamet Sularno (2000) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Restribusi}}{\text{Target penerimaan restribusi}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah pemahaman tentang besarnya target, realisasi dan kategori efektivitasnya.

### 3.5.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan (Rangkuti, 1997).

### 3.5.2.1 Matriks

Berikut akan dijelaskan tentang Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE), Matriks *External Factor Evaluation* (EFE), matriks Threats Opportunity Weaknesses Strengths (TOWS/SWOT), Matriks Internal Eksternal (IE).

#### 1. Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data informasi aspek internal Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal dapat digali dari beberapa fungsional kegiatan usaha, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi, dan aspek operasi

##### a. Tahapan Kerja

Pada prinsipnya tahapan kerja matriks IFE sama dengan matriks EFE.

1. Membuat daftar *critical success factor* untuk aspek internal yang mencakup perihal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).
2. Menentukan bobot (weight) dari *critical success factor* tadi dengan skala yang lebih tinggi bagi prestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0.

Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata kondisi pariwisata yang bersangkutan. (Freddy Ranguti, 2005). Nilai bobot adalah:

0,20 atau 20% : Kuat atau tinggi

0,15 atau 15% : Diatas rata-rata

0,10 atau 10% : Rata-rata

0,05 atau 5% : Dibawah rata-rata

3. Menentukan rating setiap *critical success factor* antara 1 sampai 4, dimana:

1 = sangat lemah,

2 = tidak begitu lemah,

3 = cukup kuat,

4 = sangat kuat.

Untuk menentukan rating setiap peubah antara 1-4, yaitu untuk matriks IFE rating 1 = Kelemahan utama; 2= kelemahan kecil; 3=kekuatan kecil; 4= Kekuatan utam. Sedangkan untuk matriks EFE, Rating 4=Respon tinggi; 3=Respon diatas rataaan; 2=Respon rataaan; 1=Respon kurang atau dibawah rataaan. Rating 1-4 ditentukan denga membandingkan fakta dengan penerimaan ideal yang diinginkan perusahaan.Jadi, rating mengacu pada kondisi Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal, sedangkanbobot mengacu pada masing-masing pariwisata dimana berada.

4. Mengalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya dari masing-masing faktor untuk menentukan nilai skornya.

Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total Dinas Pariwisata KabupatenTegal yang dinilai. Nilai rata-rata 2,5. Jika nilai dibawah 2,5 menandakan secarainternal, Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal adalah lemah, sedangkan nilai diatas 2,5menunjukkan posisi internal yang kuat.

Menurut Freddy Rangkuti (2005), untuk pembobotan efektivitas penerimaan retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

0,20 atau 20% : Sangat efektif.

0,15 atau 15% : Cukup efektif.

0,10 atau 10% : kurang efektif.

0,05 atau 5% : Sangat tidak efektif.

Untuk pemberian rating pada penerimaan retribusi pariwisata dan efektifitas penerimaan retribusi pariwisata adalah sebagai berikut:

1 = sangat lemah,

2 = tidak begitu lemah,

3 = cukup kuat,

4 = sangat kuat.

Untuk menentukan rating setiap peubah antara 1-4, yaitu untuk matriks IFE rating 1 = Kelemahan utama; 2= kelemahan kecil; 3=kekuatan kecil; 4= Kekuatan utam. Sedangkan untuk matriks EFE, Rating 4=Respon tinggi; 3=Respon diatas rataa; 2=Respon rataa; 1=Respon kurang atau dibawah rataa. Rating 1-4 ditentukan dengan membandingkan fakta dengan penerimaan ideal yang diinginkan perusahaan. (Freddy Rangkuti,2005).

## **2. Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)**

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisa hal-hal

menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi. Hal ini penting karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha.

#### **a. Tahapan Kerja**

1. Membuat daftar *critical success* faktor (faktor-faktor yang mempunyai dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk aspek eksternal yang mencakup perihal *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).
2. Menentukan bobot (*weight*) dari *critical success factor* tadi dengan skala yang lebih tinggi bagi prestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata kondisi pariwisata yang bersangkutan.
3. Menentukan rating setiap *critical success factor* antara 1 sampai 4, dimana:
  - 1 = di bawah rata-rata,
  - 2 = rata-rata,
  - 3 = di atas rata-rata,
  - 4 = sangat bagus.
4. Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal.
5. Mengkalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua *critical success factor*.

6. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal yang dinilai. Skor total 4,0 mengindikasikan bahwa *stake holder* merespon dengan cara yang luar biasa terhadap peluang-peluang yang ada dan menghindari ancaman-ancaman. Sementara itu, total skor sebesar 1,0 menunjukkan *stake holder* tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada atau tidak dapat menghindari ancaman-ancaman eksternal. (Mandasari, 2006)

### 3. Matriks *Threats – Opportunity – Weaknesses - Strengths* (SWOT)

Matriks *Threats– Opportunity– Weaknesses-Strengths* (SWOT) merupakan *matching tool* yang penting untuk membantu para Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal untuk mengembangkan empat tipe strategi. Keempat tipe strategi yang dimaksud adalah:

- a. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)
- b. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunity*)
- c. Strategi ST (*Strength-Threats*)
- d. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Pada matriks SWOT menentukan *key success factors* untuk lingkungan eksternal dan internal merupakan bagian yang sulit sehingga dibutuhkan *judgement* yang baik. Sementara itu, tidak ada satupun *matching tool* yang dianggap paling baik.

- a. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)



Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. Jika Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal memiliki banyak kelemahan, mau tidak mau harus mengatasi kelemahannya agar menjadi kuat. Sedangkan jika banyak menghadapi banyak ancaman maka harus berusaha menghindarinya dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada.

b. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunity*)

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal.

c. Strategi ST (*Strength-Threats*)

Melalui strategi ini diharapkan dapat menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal.

d. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Strategi ini merupakan taktik bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman

### a. Kerangka Kerja

Matriks TOWS terdiri dari Sembilan sel. Ada empat sel untuk *key success factors*, empat sel untuk strategi dan satu sel yang selalu kosong (terletak di sebelah kiri atas). Keempat sel strategi berlabelkan SO, WO, ST, dan WT yang dikembangkan melalui *key success factors* pada label yang berlabelkan S, W, O, dan T.

Secara lebih jelas, berikut ini adalah delapan tahap bagaimana penentuan strategi dibangun melalui matriks TOWS / SWOT. Tahapan yang dimaksud adalah:

- a. Membuat daftar peluang eksternal
- b. Membuat daftar ancaman eksternal
- c. Membuat daftar kekuatan kunci internal
- d. Membuat daftar kelemahan kunci internal
- e. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SO
- f. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WO
- g. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi ST
- h. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WT.

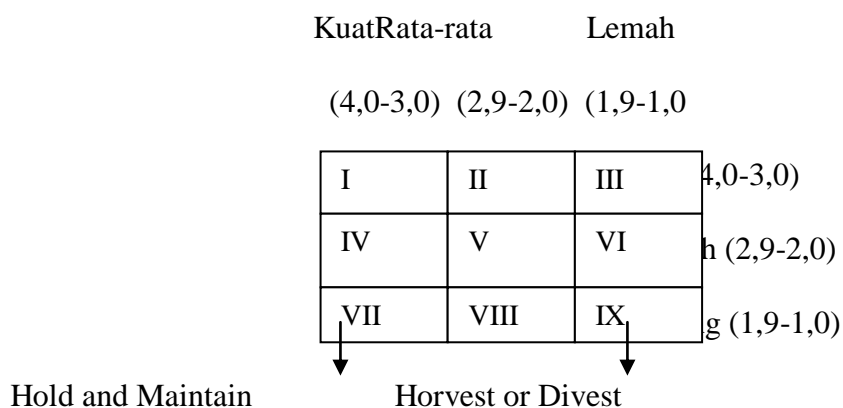
**Tabel 3.1 Analisis SWOT**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>INTERNAL</b><br><b>EKSTERNAL</b>   | <b>KEKUATAN /STRENGTHS (S)</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan kekuatan internal</li> </ul>                    | <b>KELEMAHAN/WEAKNESSES (W)</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan kelemahan internal</li> </ul>                       |
|   | <b>STRATEGI SO</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar kekuatan untuk meraih keuntungan peluang yang ada</li> </ul> | <b>STRATEGI WO</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar kelemahan yang dapat mendatangkan peluang keuntungan</li> </ul>   |
| <b>PELUANG/OPPORTUNITY (O)</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan peluang eksternal</li> </ul> | <b>STRATEGI ST</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada</li> </ul>        | <b>STRATEGI WT</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar kelemahan yang digunakan memperkecil ancaman yang ada.</li> </ul> |
| <b>ANCAMAN/THREATS (T)</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Catatan ancaman eksternal</li> </ul>     |  |   |

Sumber: Husein Umar, 2001

#### 4. Matriks Internal-Eksternal (IE)

IE matriks bermanfaat memposisikan suatu SBU (Sentral Bisnis Unit) dalam matriks yang terdiri dari 9 sel.

**Gambar 3.1 Matriks IE**

Sumber: Husein Umar, 2001

IE matriks terdiri dari dua dimensi yaitu total skor dari matriks IFE pada sumbu X dan total skor dari EFE pada sumbu Y. Pada sumbu X dari

matriks IE,skornya ada tiga, yaitu: skor 1,0-1,99 menyatakan posisi internal adalah lemah, skor 2,00-2,99 posisinya adalah rata-rata, dan skor 3,0-4,0 adalah kuat. Dengan cara yang sama,pada sumbu Y yang dipakai untuk matriks EFE, skor 1,0-1,99 adalah rendah, skor2,0-2,99 adalah sedang, dan skor 3,0-4,0 adalah tinggi.

Matriks IE memiliki tiga implikasi strategi yang berbeda, yaitu:

- a. SBU yang berada pada sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai *Grow* dan *Build*. Strategi-strategi yang cocok bagi SBU ini adalah Strategi Intensif seperti *Market Penetration*, *Market Development*, dan *Product Development* atau strategi terintegrasi seperti *Backward Integration*, *Forward Integration* dan *Horizontal Integration*.
- b. SBU yang berada pada sel III, V, dan VII paling baik di kendalikan dengan strategi-strategi *Hold* dan *Maintain*. Strategi-strategi yang cocok bagi SBU ini adalah *Market Penetration* dan *Product Development*.
- c. SBU yang berada pada sel VI, VIII, dan IX dapat menggunakan strategi *Harvest* atau *Divestiture*.